**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, serta berkomitmen untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara – negara lain di dunia untuk terlibat dalam organisasi – organisasi internasional, termasuk organisasi internasional yang fokus pada kegiatan ekonomi. Ini sesuai dengan prinsip Indonesia yaitu *thousand friends zero enemy*(memiliki banyak teman, tanpa memeiliki musuh), terlebih lagi pada saat ini dimana perkembangan perekonomian global masih mengkhawatirkan. Hal ini diperparah dengan terus berlanjutnya penurunan harga komoditas strategis seperti harga minyak bumi yang turun pada level terendah. Kondisi ini telah mempengaruhi prospek pertumbuhan di banyak negara, baik negara maju dan negara berkembang[[1]](#footnote-2).

Permasalahan ekonomi sebenarnya sudah menjadi satu isu yang telah diprediksikan oleh tokoh – tokoh internasional dari berbagai negara sebagai satu isu yang nantinya akan mencuat. Hal ini pun yang kemudian mendorong para pemimpin dunia untuk membuat sebuah badan yang dapat menampung serta membantu negara – negara yang sedang memiliki permasalahan ekonomi. Realisasi dari rasa ketakutan itu dilaksanakan pada saat para kepala negara yang terdiri dari empat puluh negara bertemu dan berunding di *Bretton Woods, New Hampshire*, Amerika Serikat pada tahun 1944 yang kemudian membuahkan tiga lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yaitu *International Monetery Fund (IMF)*, *World Bank* dan *General Agreement on Tarifft and Trade(GATT)[[2]](#footnote-3)*.

Dalam menghadapi gejolak ekonomi yang berkembang di dunia internasional,ketiga organisasi tersebut tidak bekerja sendiri namun juga dibantu dan didorong oleh perwakilan negara di dunia yang memiliki posisi penting di dalam perekonomian internasional. Pada mulanya negara – negara kapital ataupun negaraindustri maju mendeklarasikan diri kedalam sebuah forum yang bernama *Group of 7 (G7)*. Tercetusnya nama ini karena terdapat tujuh negara yang bernaung didalamnya yaitu Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Italia dan Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya negara – negara maju yang tergabung dalam forum G7, itu saja tidak cukup untuk menangani kompleksnya masalah yang dihadapi pada perekonomian internasional.

Pada 25 September 1999 kemudian dibentuklah sebuah forum yang menaungi negara - negara maju dan berkembang untuk menangani masalah perekonomian internasional. Forum G20 *(group of 20)* lahir sebagai kepanjangan tangan dari G7 yang beranggotakan Argentina, Japan, Australia, Korea, Brazil, Mexico, Canada, Rusia, China, Saudi Arabia, France, South Africa, Germany, Turkey, India, United Kingdom, Indonesia, United States, Italia, Uni Eropa.

Secara resmi G20 dinamakan *The Group of Twenty (G20) Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok DuaPuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan – kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu – isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada.

Satu – satunya negara Asia Tenggara (ASEAN) yang menjadi anggota dari G20, adalah Indonesia. Bagi Indonesia, G20 sendiri merupakan sebuah forum ekonomi yang penting, dimana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global.Dengan menjadi anggota G20, citra ekonomi Indonesia di dunia global mampu dilihat sebagai suatu negara yang mempunyai perekonomian yang baik, hal ini tentu berkaitan dengan citra ekonomi Indonesia di dunia internasional.

Dengan menjadi anggota forum G20, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktek – praktek diplomasi yang bersifat multilateral khususnya dalam bidang ekonomi. Diplomasi itu sendiri, merupakan alat bagi negara untuk menjalankan misi dan kepentingannya tanpa menciptakan permusuhan terhadap negara lain, serta digunakan untuk mengkonstruksi citra positif negara tersebut.[[3]](#footnote-4)Dengan demikian, cukup jelas bahwa diplomasi adalah sebuah cara untuk menjalin kerjasama dalam hubungan internasional demi mencapai kepentingan bersama, yang dapat dilakukan dengan bernegosiasi.

Diplomasi harus dapat menjadi pilihan utama dan jalan keluar bagi sebuah negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Sebagai contoh, tantangan ekonomi global dewasa ini terus berkembang, bukan hanya dipenuhi perlambatan ekonomi yang terjadi tetapi juga ada ketidakpastian, *vulnerable, uncertain, complex* dan *ambiguity* yang dihadapi oleh ekonomi dunia sehingga memerlukan kebijakan yang tepat[[4]](#footnote-5). Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi saat ini adalah diplomasi ekonomi.

Secara garis besar, diplomasi ekonomi merupakan penggunaan usaha dari sebuah negara dengan menggunakan seluruh elemen ekonomi yang ada, ke wilayah internasional guna memenuhi kepentingan nasional[[5]](#footnote-6).

Tujuan mendasar dari diplomasi ekonomi dapat dikatakan sama saja dengan tujuan dari diplomasi pada umumnya yaitu untuk memenuhi kepentingan negara, namun ada kekhususan tujuan dalam diplomasi ekonomi, antara lain[[6]](#footnote-7):

1. Pembuatan kebijakan luar negeri yang pro ekonomi agar dapat mencapai kepentingan nasional terlebih khusus pada sektor ekonomi;
2. Mengkondisikan pemasaran dan keuangan luar negeri agar sesuai dengan keadaan global;
3. Untuk menarik perhatian dari investor pada segala sektor ekonomi nasional;
4. Mempromosikan negara atau membangun citra negara seperti yang biasa ditampilkan dalam kegiatan promosi pariwisata.

Untuk mencapai tujuan dari diplomasi ekonomi tersebut, maka perlu adanya sebuah hubungan dengan negara – negara lain di dunia internasional.

Secara struktural, urusan luar negeri menjadi tanggung jawab Departemen Luar Negeri RI, namun sebagai salah satu elemen ekonomi di Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan RI memiliki kewajiban untuk turut serta mensukseskan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dalam keterlibatannya dalam forum G20 sebagai perwakilan Indonesia.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien.[[7]](#footnote-8)

Hubungan yang independensi dalam interdependensi dengan pemerintah, meskipun BI merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bukan hanya bersifat konsultatif terlebih lagi di era globalisasi dan keterbukaan yang semakin kompleks saat ini, sebab tugas – tugas BI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan – kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.[[8]](#footnote-9)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan dipimpin oleh seorang Menteri Keuangan (Menkeu) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Sri Mulyani. Sebagai bagian dari suatu pemerintahan, Kementerian Keuangan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai peranan vital di dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan perekonomian. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar apabila disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Peranan vital Kementerian Keuangan adalah mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan dapat dikatakan sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Raksa).[[9]](#footnote-10)

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan menuangkan hasilnya kedalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Perandiplomasi ekonomi Indonesia di forum G20dalam pemenuhan kepentingan nasional.”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis mengindentifikasi beberapa masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana diplomasi Indonesia di forum G20?
2. Bagaimana pemenuhan kepentingan nasional Indonesia?
3. Bagaimana dampak positif dari diplomasi ekonomi Indonesia di forumG20 bagi penanganan krisis ekonomi global, peningkatan daya saing nasional dan memajukan citra Indonesia di mata masyarakat internasional?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi diseputar masalah penelitian dan begitu panjangnya rentang waktu yang berjalan, sedangkan kemampuan penulis baik dalam pencarian data dan ketersediaan dana ada keterbatasannya, serta agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah penelitian. Adapun pembatasan masalah penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti, yaitu dampak positif peran diplomasi ekonomi Indonesia di forum G20dalam pemenuhan kepentingan nasional, meliputi penanganan krisis ekonomi global, peningkatan daya saing nasional dan memajukan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah penulis uraikan dan lakukan diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu ***“*Bagaimana peran diplomasi ekonomiIndonesia di forum G20terhadap promosi dan pemenuhan kepentingan nasional*?”***

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengatahui diplomasi Indonesia di forum G20;
2. Mengetahui bagaimana pemenuhan kepentingan nasional Indonesia;
3. Mengetahui dampak positif dari diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia di forum G20 bagi penanganan krisis ekonomi global, peningkatan daya saing nasional dan memajukan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Akademik
2. Bagi jurusan ilmu hubungan internasional, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang diplomasi khususnya diplomasi ekonomi;
3. Bagi jurusan ilmu hubungan internasional, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang *The Group of Twenty (G20)*
4. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang tugas dan fungsi internasional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia ditingkat internasional.
5. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentangperan dari Kementerian Keuangan RI dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia ditingkat internasional.
6. Kegunaan Aplikatif
7. Bagi penulis, penelitian ini sangat menambah pengetahuan, wawasan, kemampuan analisis fenomena – fenomena internasional yang terjadi, serta menambah pengalaman bekerjasama dan berinteraksi dengan pelaku – pelaku diplomasi ekonomi.
8. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai dampak positif diplomasi ekonomi Indonesia di *Group of Twenty (G20)*.
9. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
10. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah teori – teori yang digunakan peneliti sebagai landasan untuk menganalisa masalah penelitian, dengan demikian diperlukan teori – teori dan konsep – konsep yang mempunyai penjelasan lebih baik untuk menganalisis fenomena yang lebih luas dan memuaskan. Penelitian ini ditinjau dari sudut pandang ekonomi politik internasional.

Setiap teori yang ada dalam hubungan internasional tentu dilandasi berbagai asumsi dasar yang berbeda - beda sehingga masing – masing teori tidak akan sama dan tidak selalu *applicable* untuk menjelaskan ragam fenomena yang terjadi. Dengan demikian, tercipta banyak teori yang menyesuaikan dengan keadaan, sebab salah satu sifat dasar teori adalah kondisional dimana teori lahir dari suatu keadaan tertentu sehingga dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut.

Hubungan internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembangsesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi olehperubahan kondisi lingkungan. Pada awal proses perkembangannya,sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu hubungan internasional mencakupsemua hubungan antar negara. **McClelland** dalam buku yang berjudul *Ilmu Hubungan Internasional* berpendapat bahwa:

**“hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara jenis – jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan – keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara – negara baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara.”[[10]](#footnote-11)**

Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain.

Didalam Hubungan Internasional salah satu yang menjadi pokok kajian(*core subject*) adalah Politik Luar Negeri, dimana kebijakan suatau negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*karya **Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani** menyatakanbahwa:

**"Secara umum, politik luar negeri *(foreign policy)* merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.”[[11]](#footnote-12)**

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa sekarang, sangat tepat rasanya mengikutsertakan teori kerjasama internasional dalam penelitian ini, karena semua negara didunia tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemejuan negaranya. Pengertian kerjasama internasional itu sendiri menurut **Koesnadi Kartasasmita** adalah:

**“suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepensia dan bertambah kompleksnya kehidupan – kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena *national understanding* dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan yang saling membutuhkan dan kepentingan bersama diatara negara – negara, namun kepentingan itu tidak identik.”[[12]](#footnote-13)**

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajaritentang penyebab – penyebab dan kondisi – kondisi yang menciptakan kerjasama.Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian – penyesuaian perilakuaktor – aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan – pilihan yang diambiloleh aktor – aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan – pilihan yang diambiloleh aktor – aktor lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh **Dougherty** dan **Pfaltzgraff,** bahwa:

**“Kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan – hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional yaitu PBB atau Uni Eropa. Aktor – aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan – aturan yang disetujui, regulasi – regulasi,norma – norma, dan prosedur – prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan – harapan para aktor dan kepentingan – kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.”[[13]](#footnote-14)**

Sudah terbukti bahwa tidak satupun negara yang dapat dan mampu hidupsendiri, serta hampir setiap negara mempunyai masalah masing – masing yang tidakdapat diselesaikan sendiri. Dalam permasalahan tersebut kadang kala dibutuhkanhubungan atau bantuan dari negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionaldari suatu negara.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Implementasinya dengan ikut terlibat dalam organisasi internasional atau rezim internasional. Sebagaimana organisasi internasional menurut **Clive Archer** dalam bukunya *International Organization* menyatakan bahwa:

**“organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota – anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.”[[14]](#footnote-15)**

Sedangkan rezim internasional banyak mempengaruhi efektif dan tidak efektifnya sebuah kerjasama internasional. Keberadaan penyangga rezim internasional membuat peran organisasi internasional lebih signifikan. Rezim berasal dari tradisi liberal yangberargumen bahwa berbagai institusi atau rezim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara (maupun aktor internasional yang lain)[[15]](#footnote-16).

Rezim internasional muncul untuk menjawab kemungkinan kerjasama antar negara dalam situasi anarki sistem internasional yang tidak memiliki otoritas kekuasaan terpusat. Anarki tidak berarti *chaos* karena masih terdapat aturan (*rules*) dalam sistem internasional.Terdapat banyak definisi rezim internasional namun yang banyak menjadi rujukan adalah pendapat **Krasner** yaitu:

***“international regimes are defined as principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in agiven issue area”.* (Rezim internasional dapat didefinisikan mencakup seperangkat prinsip – prinsip, norma – norma, aturan – aturan dan prosedur pembuatan kebijakan yang implisit maupun eksplisit yang muncul dari bertemunya ekspektasi para aktor di dunia internasional)[[16]](#footnote-17).**

Rezim internasional dianggap memiliki kemampuan mengkoordinasikan perilaku negara. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar ‘perjanjian sementara’ *(temporary agreement)* sesaat yang dapat berubah oleh setiap terjadi perpindahan pergeseran *power* dan *interest[[17]](#footnote-18)*.

G20 merupakan rezim internasional, yang tidak memiliki institusi atau kantor tetap. Setiap tahun, terjadi pergantian *troika* (kepemimpinan) untuk pengadaan *summit.* Meskipun tidak *legally binding* (mengikat secara hukum) namun G20 menghasilkan seperangkat prinsip – prinsip, norma – norma, aturan – aturan dan prosedur pembuatan kebijakan.

Bagi Indonesia, G20 sendiri merupakan sebuah forum ekonomi yang penting, dimana Indonesia dapat mempromosikan kepentingan ekonomi nasionalnya dan berkontribusi pada pembentukan tata kelola ekonomi global.Dengan menjadi anggota forum G20, dapat dikatakan bahwa Indonesia telah melakukan praktek – praktek diplomasi yang bersifat multilateral untuk memenuhi kepentingan nasional khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut **Martin Griffiths** dan **Terry O’Callaghan** dalam bukunya *International Relation “The Key Concept”*menjelaskan bahwa:

**“diplomasi merupakan alat bagi negara untuk menjalankan misi dan kepentingannya tanpa menciptakan permusuhan terhadap negara lain, serta digunakan untuk mengkonstruksi citra positif negara tersebut.”[[18]](#footnote-19)**

Dengan demikian, cukup jelas bahwa diplomasi adalah sebuah cara untuk menjalin kerjasama dalam hubungan internasional demi mencapai kepentingan bersama, yang dapat dilakukan dengan bernegosiasi, dengan kata lain diplomasi harus dapat menjadi pilihan utama dan jalan keluar bagi sebuah negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya.

Dewasa ini, tantangan ekonomi global terus berkembang.Bukan hanya dipenuhi perlambatan ekonomi yang terjadi tetapi juga ada ketidakpastian, *vulnerable, uncertain, complex* dan *ambiguity* yang dihadapi oleh ekonomi dunia sehingga memerlukan kebijakan yang tepat. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi saat ini adalah diplomasi ekonomi.

Secara garis besar, diplomasi ekonomi merupakan penggunaan usaha dari sebuah negara dengan menggunakan seluruh elemen ekonomi yang ada, ke wilayah internasional guna memenuhi kepentingan nasional. Menurut**G. R. Berridge** dan **Alan James** dalam bukunya *A Dictionary of Diplomacy*, menerangkan bahwa:

***“Economic Diplomacy is concerned with economic policy issues, e.g. work of delegations and standard setting organization such as WTO and BIS. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and give the home government advice on how to best influence them. Economic diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called “economic statecraft”.* (Diplomasi ekonomi berkonsentrasi pada isu – isu kebijakan ekonomi misalnya pekerjaan delegasi dan setelan standar organisasi seperti WTO dan BIS. Para diplomat ekonomi juga memantau dan melapor kebijakan ekonomi di negara – negar asing dan memberikan saran pada pemerintah negaranya tentang bagaimana cara terbaik untuk mempengaruhi mereka. Diplomasi ekonomi memperkerjakan sumberdaya ekonomi, baik sebagai penghargaan atau sangsi dalam mengejar sebuah *particular* tujuan kebijakan luar negeri. Hal ini kadang – kadang disebut sebagai “*statecraft economic*“).”[[19]](#footnote-20)**

Tujuan mendasar dari diplomasi ekonomi dapat dikatakan sama saja dengan tujuan dari diplomasi pada umumnya yaitu untuk memenuhi kepentingan negara, namun ada kekhususan tujuan dalam diplomasi ekonomi, antara lain:

1. Pembuatan kebijakan luar negeri yang pro ekonomi agar dapat mencapai kepentingan nasional terlebih khusus pada sektor ekonomi;
2. Mengkondisikan pemasaran dan keuangan luar negeri agar sesuai dengan keadaan global;
3. Untuk menarik perhatian dari investor pada segala sektor ekonomi nasional;
4. Mempromosikan negara atau membangun citra negara seperti yang biasa ditampilkan dalam kegiatan promosi pariwisata.

Untuk mencapai tujuan dari diplomasi ekonomi tersebut, maka perlu adanya sebuah hubungan dengan negara – negara lain di dunia internasional, namun bukan hanya untuk bagaimana negara menambah kekayaannya semata, tetapi lebih dari pada itu interaksi-interaksi yang dilakukan antara aktor – aktor politik internasional dan pasar internasional juga perlu diperhatikan agar dapat memenuhi kepentingan negara. Karena perekonomian internasional tidak dapat berjalan sepenuhnya terlepas dari adanya kepentingan – kepentingan politik di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, keputusan politik internasional juga didasari dari pertimbangan – pertimbangan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan aktor yang bersangkutan[[20]](#footnote-21).Oleh karena itu, Ekonomi Politik Internasional lahir sebagai studi yang secara spesifik membahas interaksi – interaksi ekonomi politik antar negara. Seperti yang dinyatakan oleh **Robert Gilpin** dalam bukunya *Global Political Economy “Understanding the International Economic Order”,* bahwa:

**“Ekonomi Politik Internasional memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak membahas mengenai bagaimana negara menambah kekayaannya, namun membahas interaksi – interaksi yang dilakukan antara aktor – aktor politik internasional dan pasar internasional. Selain itu, studi Ekonomi Politik Internasional juga membahas metode – metode untuk memperoleh kepentingan nasional suatu negara, relasi interdependensi antar negara, serta rezim – rezim internasional.”[[21]](#footnote-22)**

Sebagai tambahan, menurut **Robert Gilpin** dalam bukunya *The Political Economy of International Relations,* menyatakan bahwa:

**“terdapat tiga teori yang umumnya dianggap sebagai *grand theories* dalam studi Ekonomi Politik Internasional. Teori pertama adalah teori liberalisme yang memiliki asumsi dasar bahwa pasar merupakan entitas tersendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau politik. Teori kedua adalah merkantilisme yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor dominan dalam ekonomi politik internasional. Teori ketiga adalah Marxisme yang menganggap bahwa terdapat adanya *segregasi* kelas borjuis-proletar dalam ekonomi politik internasional.”[[22]](#footnote-23)**

Dari tiga *grand theories* yang ada dalam studi Ekonomi Politik Internasional, penulis memilih untuk menggunakan teori merkantilisme dalam penelitian ini, karena forum G20 adalah forum yang terdiri dari negara – negara berdaulat dan Bank Indonesia (BI) serta Kementerian Keuangan merupakan perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam forum tersebut.

Dalam teori merkantilisme, negara merupakan aktor utama yang akan selalu berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya termasuk dengan caraekonomi. Setiap negara akan cenderung bersifat egois karena ada tendensi bagi setiap negara untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal dan membuat pihak lain untuk mengalami kerugian atau bersifat *zero-sum*.[[23]](#footnote-24)

Dengan keterlibatannya Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan sebagai representatif negara Indonesia di forum G20, dapat dikatakan bahwa negara Indonesia telah menerapkan teori merkantilisme. Hal ini juga didukung oleh teori lembaga ekonomi nasional yang menerangkan bahwa lembaga ekonomi nasional merupakan lembaga yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi, demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ekonomi ini lahir sebagai usaha manusia dalam menyesuaikan dirinya dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan suatu pengaturan bidang - bidang ekonomi dalam rangka untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera.Adapun contoh dari lembaga ekonomi nasional yaitu kementerian keuangan serta bank sentral[[24]](#footnote-25).

Berdasarkan teori dan konsep – konsep yang dikemukakan oleh para ahli diatas berkenaan dengan objek penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa asumsi:

1. Dalam usaha mewujudkan kepentingan nasional masing - masing negara, ada cara -cara tertentu yang harus ditempuh oleh suatu negara. Cara – cara tertentu yang dilakukan dalam rangka merealisasikan kepentingan nasional suatu negara itu dapat melalui sebuah interaksi antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan dan dapat memenuhi kepentingannya, proses interaksi tersebut biasa disebut sebagai kerjasama.
2. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, dewasa ini sebuah negara akan lebih menggunakan pendekatan *soft power* ketimbang pendekatan *hard power*. Diplomasi adalah salah satu bentuk pendekatan *soft power* yang digunakan oleh sebuah negara untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan nasional.
3. Salah satu bentuk kerjasama dan diplomasi dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan skala multilateral adalah dengan keterlibatan Bank Indonesia(BI) dan Kementerian Keuangan dalam forum G20 sebagai perwakilan negara Indonesia.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:**“Jika Indonesia dapat memerankan diplomasi ekonomi secara optimal di forum G20, maka akan berdampak positif pada pemenuhan kepentingan nasional.”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional variabel tentang konsep hipotesis, sebagai berikut:

**Tabel 1:**

**Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel****(Konsep Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi Data****(Analisis)** |
| Variabel Bebas:*Jika* Indonesia dapat memerankan diplomasi ekonomi secara optimal di forum G20 | 1. Presiden RI, Joko Widodo menjadi pembicara utama di KTT G202016 Hangzhou, Tiongkok
 | Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara utama sesi ke-2 dalam konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2016 di Hangzhou, Tiongkok dengan mengangkat isu tiga pilar yakni inovasi, revolusi industry baru, dan ekonomi digital. Sumber: antaranews.com dan presidenri.go.id |
| 1. Indonesia menjadi inisiator *General Expenditure Support Fund (GESF)* dan *co-chair* kelompok kerja dalam forum G20
 | Karena memiliki pengalaman dalam mengatasi krisis finansial, Indonesia memiliki modalitas untuk berkontribusi dalam merumuskan cara - cara untuk menangani krisis secara efektif. Indonesia telah menawarkan inisiatifnya dalam forum G20 dan menjadi *co-chair* kelompok - kelompok kerja untuk menyusun detil agenda dan rencana aksi untuk merealisasikan inisiatif tersebut. Indonesia juga memahami bahwa sebagai suatu *emerging economy*, Indonesia harus mengartikulasikan kepentingan negara - negara berkembang dalam proses G20. Indonesia adalah inisiator *“General Expenditure Support Fund” (GESF)* yang membantu untuk menyediakan likuiditas dana dari IMF dan Bank Dunia bagi negara - negara berkembang.Sumber: Jurnal Proyek Riset G20 “Peran Indonesia dalam G20: Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia”  |
| Variabel Terikat:*maka* akan berdampak positif terhadap pemenuhan kepentingan nasional. | 1. Indonesia memiliki nilai tawar menawar (*bargaining position*) dan *political influence* yang tinggi di arena internasional
 | 1. Usulan Indonesia tentang mekanisme dukungan pembangunan bagi negara – negara berkembang dalam mengatasi krisis keuangan internasional, mendapat dukungan luas dari negara anggota forum G20 dan diadopsi dalam komunike G20.

Sumber: antaranews.com 1. Sherpa G20 Indonesia, Dr. Rizal Affandi Lukman, telah diminta secara khusus untuk menyampaikan *lead intervention* pada sesi *Robust International Trade and Investment*, khususnya menyangkut isu partisipasi *Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)*, atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada *Global Value Chains (GVCs)* dan perdagangan global.

Sumber: ekon.g.id - 19 Januari 2016 1. Sherpa Indonesia, Dr. Rizal Affandi Lukman,diminta menjadi salah satu pembicara kunci pada sesi *Working Lunch* dengan *Think20 (T20)* dan *Women20 (W20)* sebagai *outreach* groups G20.

Sumber: ekon.go.id - 15 Desember 2016 |
|  | 1. Indonesia adalah negara dengan daya saing rengking 37 di dunia
 | Indonesia berada pada rengking 37 dengan nilai 4,52 dari 140 negara dengan daya saing ekonomi maju. Sumber: *“The Global Competitiveness Report 2015-2016”. World Economic Forum* |
|  | 1. Kepercayaan para pelaku pasar global untuk berinvestasi di Indonesia
 | Realisasi investasi pada TriwulanIII2016:Rp155,3 triliun,meningkat2,5%dariTriwulanII2016(Rp151,6 triliun)ataumeningkat10,7%dariTriwulanIII2015(Rp140,3 triliun). RealisasiinvestasipadaJanuari – September2016:Rp453,4 triliun,meningkat13,4%daritahunsebelumnyayaituJanuari – September2015(Rp400,0 triliun). Sumber: “Realisasi Penanaman Modal PMDN – PMA Triwulan III dan Januari – September 2016”. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar 1: Skema Karangka Teoritis**

Indonesia

Bank Indonesia

(BI)

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

Diplomasi EkonomiIndonesia

Promosi dan Pemenuhan

Kepentingan Nasional Indonesia

Kemajuan Citra

Indonesia

Peningkatan Daya Saing

Nasional

Penanganan

Krisis Ekonomi

*Group of Twenty*

(G20)

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis digunakan penulis agar memudahkan penulis memilah – milah masalah yang paling layak ditekankan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinanmelakukan kesalahan metodologis yang disebut *Fallacy of Composition* dan *Ecological fallcy*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa induksionis[[25]](#footnote-26).

Analisa induksionis merupakan tingkat analisa yang memiliki tingkatan unit eksplanasi lebih tinggi[[26]](#footnote-27). Dimana, penulis akan menempatkan variabel bebas yaitu JikaIndonesia dapat memerankan diplomasi ekonomi secara optimal di forum G20 dan menempatkan variabel terikat yaitu maka akan berdampak positif terhadap pemenuhan kepentingan nasional.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur dan cara dalam pengumpulan data dananalisis agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir sistematis. Untuk memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis.

Metode penelitian deskriptif analitis digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode deskriptifanalitis merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun mengintepretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam metode deskriptif, masalah – masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan – kegiatan, sikap – sikap, pandangan – pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh dari suatu fenomena. Dengan metode ini dapat diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lain. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa – hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan[[27]](#footnote-28).

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah – langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur*(library research)*.

Studi kepustakaan yaitu sebuah studi yang dilakukan melalui penelaahan data terhadap buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data – data yang terdapat dalam website atau internet[[28]](#footnote-29).

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk membantu mencari sumber – sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di berbagai tempat yang terkait dengan masalah. Adapun lokasi penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan,

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung

1. Bank Indonesia,

Jln. M. H. Thamrin, No. 2 Jakarta Pusat

1. **Lama Penelitian**

Lamanya waktu penelitian dalam menulis skripsi ini membutuhkan waktu enam bulan terhitung sejak di sahkannya judul penelitian ini, pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.



**Tabel 2: Jadwal Kegiatan Penelitian 2016-2017**

1. **Sistematika Penulisan**

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab – bab lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** Dalam bab I ini membahas tentang pendahuluan, berisikan sub - sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, lokasi dan lama penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan varaibel bebas, yaitu *profile* dan sejarah terbentuknya forum G20, *profile* dan sejarah Bank Indonesia, *profile* dan sejarah Kementerian Keuangan RI, serta diplomasi ekonomi Indonesia.

**BAB III** Dalam bab III ini berisi uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi varibel terikat yaitu dampak positif terhadap penanganan krisis ekonomi, peningkatan daya saing nasional dan kemajuan citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

**BAB IV** Dalam bab IV ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator – indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V** Dalam bab V ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yangtelahdilakukan.

1. *Siaran Pers, Kementerian Keuangan, Hasil Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Shanghai, Tiongkok, 26 – 27 Februari 2016*, ([http://www.kemenkeu.go.id/SP/hasil-pertemuan-tingkat-menteri-keuangan-dan-gubernur-bank-sentral-G20-di-shanghai-tiongkok-26](http://www.kemenkeu.go.id/SP/hasil-pertemuan-tingkat-menteri-keuangan-dan-gubernur-bank-sentral-g-20-di-shanghai-tiongkok-26), diakses pada 27 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-2)
2. *Toruan, Denis Pejl. Kerjasama G20. Universitas Indonesia*, ([http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133589-T%2027885-Kerjasama%20G20-Literatur.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/133589-T%2027885-Kerjasama%20G-20-Literatur.pdf), diakses pada 27 Desember 2016). [↑](#footnote-ref-3)
3. Griffiths, Martin, dan Terry O’Callaghan. 2002. *International Relation:” The Key Concept”.* New York: Routledge Guides. [↑](#footnote-ref-4)
4. Info Bank News, Diplomasi Ekonomi Perlu Ditingkatkan, (<http://infobanknews.com/diplomasi-ekonomi-perlu-ditingkatkan/>, diakses pada tanggal 7 November 2016). [↑](#footnote-ref-5)
5. Lee, Donna and Brian Hocking. 2010. “Economic Diplomacy” in Robert A. Denmark (ed.) The International Studies Encyclopedia, Vol. II, pp 1216-1227. Wiley Blackwell. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Bank Indonesia, Tentang BI, Hubungan Kelembagaan*, (<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/hubungan-kelembagaan/negara/Contents/Default.aspx>, diakses pada tanggal 7 November 2016). [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Kementerian Keuangan RI, Sejarah,* (<http://www.kemenkeu.go.id/Wide/sejarah-kementerian-keuangan>, diakses pada tanggal 6 Maret 2016). [↑](#footnote-ref-10)
10. McClelland, Charles. A. 1981. *Ilmu Hubungan Internasional: “Teori dan Sistem”*. Jakarta: C.V. Rajawali. [↑](#footnote-ref-11)
11. Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. “*Pengatar Ilmu Hubungan Internasional”*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. [↑](#footnote-ref-12)
12. Kartasasmita, Koesnadi. “*Organisasi dan Administrasi Internasional”* (Bandung: Fisip Universitas Padjadjaran Press, 1983), hal. 83 dalam Liberty Eduardo Zwageri Mozes, *“Kerjasama Indonesia – Cina Dalam Promosi dan Pemasaran Pariwisata Bersama Terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Cina Ke Indonesia”*, Skripsi Fisip-HI Unpas tidak diterbitkan, 2013, hal. 12. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *“Conteding Theories of International Relation”.* USA: J.B Lippincott Company. [↑](#footnote-ref-14)
14. Archer, Clive. 1983. “*International Organization”.* New York: Routledge. [↑](#footnote-ref-15)
15. Krasner, Stephan D. 1982. “*Structural Causes and Regime Consequenses: Regime as Intervening Variables”. International Organization.* The MIT Press. Vol. 36, No. 2, pp. 185-205. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
17. Jervis, Robert. 1978. “*Cooperation Under the Security Dilemma”. World Politics.* Pp 167-214 [↑](#footnote-ref-18)
18. Griffiths, Martin, dan Terry O’Callaghan. *Op. Cit.*  [↑](#footnote-ref-19)
19. Berridge, G.R, dan Alan James. 2001. *“A Dictionary of Diplomacy”*. Hampshire, UK. Palgrave Pulb. (Formerlt Macmillan Press Ltd). pp. 81. [↑](#footnote-ref-20)
20. Cohen, Benjamin. 2008. *International Political Economy: “An Intellectual History*”. Princeton University Press. [↑](#footnote-ref-21)
21. Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: “Understanding the International Economic Order”.* Princeton University Press. [↑](#footnote-ref-22)
22. Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations.* Princeton University Press. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. Pengertianku, Pengertian Lembaga Ekonomi Dan Contohnya Serta Fungsinya, (<http://www.pengertianku.net/2015/05/pengertian-lembaga-ekonomi-dan-contohnya.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017). [↑](#footnote-ref-25)
25. Mas’oed, Mohtar. 1990. *Ilmu hubungan Internasional: “Disiplin dan Metodologi”.* Jakarta: LP3ES. hal. 36-37 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* hal. 44 [↑](#footnote-ref-27)
27. Tim Jurusan Hubungan Internasional. *“Panduan Penyusunan Skripsi*”. Fisip Unpas, Bandung 2012. hal. 39. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.* hal. 40. [↑](#footnote-ref-29)